






UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	FHIH.19	Mata Kuliah Keahlian Prodi	3 SKS	VI (ENAM)	
	Dosen Pengembang RPS  AMINOEL AKBAR N.M, S.H., M.H		Dosen Pengampu  AMINOEL AKBAR N.M, S.H., M.H		Ketua Prodi  YULI HERIYANTI, S.H., M.H
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi CP-MK				
Deskripsi Singkat MK	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Adalah Seperangkat Aturan Yang Mengatur Tentang Tindakan Seseorang/Pribadi Maupun Badan Hukum Yang Mempertahakan Hak-Hak Dan Cara Untuk Mempertahankan Dan Menegakan Hukum Administrasi Negara Di Muka Peradilan Tata Usaha Negara.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Menjelaskan Mengenai Pengertian Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Asas-Asas Beracara Di PTUN, Kompetensi PTUN, Objek Sengketa TUN, Subjek Sengketa TUN, Sumber Kewenangan Badan, Upaya Administrative, Komptensi TUN, Pengertian Gugatan, Surat Kuasa, Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di PTUN, Alasan Mengajukan Gugatan, Syarat-Syarat Surat Gugatan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Alamat Mengajukan Gugatan Dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Bagi Yang Wilayahnya Lebih Luas Laut Dari Daratan Dan Tuntutan Pada Gugatan, Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal) Dan Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, Pemeriksaan Dengan Acara Singkat Dan Cepat, Putusan Pengadilan Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Dan Eksekusi				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagir Manan .1992 Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia , Jakarta : In Hill co. 2. ----- .1995 Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung : Pusat Penelitian. LPPM-Universitas Islam. 3. Djoko Prakoso.1988. Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986).Yogyakarta : Liberty. 4. Hamid Atamimmi.1990 Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.Disertasi. Jakarta Universitas Indonesia. 5. H.Abdul Latif.2005 Hukum dan Peraturan Kebijakan Publik (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta : Ull Press. 6. H.R.Ridwan.2006. Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta : Ull Press. 7. Indroharto.1988.Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta : Sinar Harapan. 8. Jazim Hamidi.1999. Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Indonesia.. Bandung :Citra Aditya Bakti 9. ----- . 1993 Usaha Memahami Undang -undang Peradilan Tata Usaha Negara.Buku I. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 10. Philipus M Hadjon. 1993. Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur). Surabaya : Yuridika. 11. ----- . Dkk.1994 Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 12. Satjipto Rahardjo.1986.IlmU Hukum. Bandung : Penerbit Alumni. 13. Sugeng Prijodarminto.1993.Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara.Jakarta : Pradnya Paramita. 14. W.Riawan Tjandra.2010.TeorI & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara.Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 15. Yuslim.2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta : Sinar Grafika. 16. Zairin Harahap.2007.Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Jakarta: Raja Grafindo. 				
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop,LCD dan multi media class equip ment</i>				
Team Teaching					

Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Pengertian Hukum Acara PTUN	1. 1.Rencanana Perkuliahan Semester 2. Kontrak Mata Kuliah 3. Pengantar Mk	Pengantar Mk	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
2	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Pengertian Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	1. Pengertian Negara Hukum 2. Negara Hukum Indonesia 3. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	Pengertian Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
3	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Pengertian Peradilan Dan Pengadilan, Eksistensi Di Bentuknya PTUN Di Indonesia, Kedudukan Dan Susunan PTUN Dan Pembinaan Peradilan	1. Pengertian Peradilan Dan Pengadilan. 2. Eksistensi Di Bentuknya PTUN Di Indonesia. 3. Kedudukan Dan Susunan PTUN. 4. Pembinaan Peradilan	Peradilan Dan Pengadilan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
4	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Asas-Asas Hukum Acara Secara Umum, Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik Menurut Konsep Mari Dan Asas-Asas Beracara Di PTUN	1. Asas-Asas Hukum Acara Secara Umum 2. Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik Menurut Konsep Mari 3. Asas-Asas Beracara Di PTUN	Asas-Asas Beracara Di PTUN	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
5-6	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Kompetensi PTUN, Objek Sengketa TUN, Subjek Sengketa TUN Dan Sumber Kewenangan Badan	1. Kompetensi PTUN 2. Objek Sengketa TUN 3. Subjek Sengketa TUN 4. Sumber Kewenangan Badan	Kompetensi PTUN, Objek Sengketa TUN, Subjek Sengketa TUN, Dan Sumber Kewenangan Badan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
7	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Upaya Administrative Dan Komptensi TUN	1. Upaya Administrative 2. Komptensi TUN	Upaya Administrative Dan Komptensi TUN	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
8	Ujian Tengah Semester				
9-10	Mahasiswa Mampu	1. Pengertian Gugatan	Pengertian Gugatan, Surat	1. Ceramah	1. Test

	Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Pengertian Gugatan, Surat Kuasa, Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di PTUN, Alasan Mengajukan Gugatan, Syarat-Syarat Surat Gugatan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Alamat Mengajukan Gugatan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Bagi Yang Wilayahnya Lebih Luas Laut Dari Daratan Dantuntutan Pada Gugatan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Kuasa 3. Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di PTUN 4. Alasan Mengajukan Gugatan 5. Syarat-Syarat Surat Gugatan 6. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan 7. Alamat Mengajukan Gugatan 8. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Bagi Yang Wilayahnya Lebih Luas Laut Dari Daratan. 9. Tuntutan Pd Gugatan 	Kuasa, Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di PTUN, Alasan Mengajukan Gugatan, Syarat-Syarat Surat Gugatan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Alamat Mengajukan Gugatan Dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Bagi Yang Wilayahnya Lebih Luas Laut Dari Daratan Dantuntutan Pada Gugatan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
11-15	Mahasiswa Mampu Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Tentang Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal) Dan Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, Pemeriksaan Dengan Acara Singkat Dan Cepat, Putusan Pengadilan Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Dan Eksekusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal) Dan Pemeriksaan Persiapan 2. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa 3. Pemeriksaan Dengan Acara Singkat Dan Cepat 4. Putusan Pengadilan 5. Upaya Hukum 6. Pelaksanaan Putusan 7. Eksekusi 	Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal) Dan Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, Pemeriksaan Dengan Acara Singkat Dan Cepat, Putusan Pengadilan Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Dan Eksekusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
16	Ujian Akhir Semester				